De Cive:
Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Vol. 4 No. 10 November Tahun 2024 | Hal. 375 – 384

Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Membangun Budaya Politik Partisipan Mahasiswa Berkeadilan Gender

Nola Nadiyah Zahra [a,1*]
[a] Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
[1] nolanadiyahzahra@upi.edu*
*korespondensi penulis

Informasi artikel :
Received: 15 Agustus 2024;
Revised: 22 Agustus 2024;
Accepted:10 September 2024.
Kata-kata kunci:
Organisasi Kemahasiswaan;
Keadilan Gender;
Budaya Politik Partisipan.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pengkajian peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya politik partisipan yang berkeadilan gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan pemahaman partisipasi politik mahasiswa, mengenali fungsi organisasi kemahasiswaan sebagai media aktualisasi diri, serta menilai efektivitas organisasi kemahasiswaan dalam membentuk budaya politik yang adil gender. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan desain cross-sectional. Partisipan penelitian ini terdiri dari 34 mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang secara aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk budaya politik partisipan yang adil gender. Dalam mempertahankan eksistensinya, organisasi kemahasiswaan menggunakan strategi politik seperti lobi, komunikasi, dan manajemen konflik untuk menciptakan ruang partisipasi yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, efektivitas organisasi kemahasiswaan dalam menginternalisasikan konsep politik yang berkeadilan gender dapat dilihat dari proses pemilihan pemimpin yang transparan dan berlandaskan asas kesetaraan. Organisasi ini juga memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan gender melalui berbagai program kerja.

Keywords:
Student Organizations;
Gender Equality;
Participant Political Culture.

ABSTRACT

The Role of Student Organizations in Building a Gender Equal Student Participant Political Culture. *This study focuses on examining the role of student organizations in fostering a gender-equitable participant political culture. The purpose of this research is to understand the role of student organizations in enhancing political participation awareness among students, to identify the function of student organizations as a means of self-actualization, and to evaluate the effectiveness of student organizations in shaping a gender-equitable political culture. This research employs a survey method with a cross-sectional study design. The participants in this study consist of 34 students from the Indonesian University of Education who are actively involved in student organizations. The findings reveal that student organizations play a significant role in shaping a gender-equitable participant political culture. To maintain their existence, student organizations utilize political strategies such as lobbying, communication, and conflict management to create equal participation opportunities for both men and women. Moreover, the effectiveness of student organizations in internalizing gender-equitable political concepts can be observed through transparent leadership selection processes based on principles of equality. These organizations also play a key role in promoting democratic values and gender justice through various work programs.*

Copyright © 2024 (Nola Nadiyah Zahra). All Right Reserved

How to Cite : Zahra, N. N. (2024). Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Membangun Budaya Politik Partisipan Mahasiswa Berkeadilan Gender. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(11), 375–384. https://doi.org/10.56393/decive.v4i11.2493

This work is licensed under a *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*.
Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Tanggal 17 Agustus mendatang, Indonesia memasuki usia ke-77 tahun merdeka, angka yang menunjukan tidak lama lagi Indonesia mencapai waktu seabad. Di tahun 2045 digadang- gadang menjadi tahun emas bagi Indonesia, selain dari Indonesia yang akan berusia genap 100 tahun, Indonesia juga akan mengahadapi bonus demografi. Tapi pertanyaan yang muncul adalah tentang kesiapan Indonesia menyambut bonus demografi tersebut serta apakah masyarakat Indonesia benar-benar telah merdeka. Indondesia adalah negara demokrasi dan hakikat dari demokrasi sendiri adalah pembatasan kekuasaan bagi rezim pemerintah. Berbicara mengenai demokrasi maka erat kaitannya dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewasa ini peran Wanita dipahami hanya sebagai subordinasi laki-laki, Wanita dikonstruksi oleh masyarakat sebagai budak domestic yang tidak memilik peran sama sekali di ruang public. Wanita yang mencoba perintukan berperan di ruang public dianggap tidak peduli dengan keluarga dan menyalahi kodratnya. Sehingga berimplikasi kepada gerak Wanita di ruang public yang dibatasi konstuk sosial tersebut (Hadori, 2015). Hal ini diperkuat jumlah keterwakilan Wanita di parlemen, Komisi Pemilihan Umum mencatat total anggota DPR perempuan pada periode ini berjumlah 120 dari 575 anggota atau sekitar 20,87 persen jumlah anggota DPR RI. Meskipun angkanya masih terhitung kecil, setidaknya jumlah ini naik sekitar 3 persen dari periode sebelumnya yang hanya 97 orang atau sekitar 17,32 persen. Hal menjadi sebuah ironi jika dibandingkan jumlah Wanita di Indonesia yang lebih tinggi dari laki-laki yakni sebanyak 131 juta jiwa menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022, ratusan jiwa tersebut hanya diwakili oleh 97 orang, tentu saja angka yang sangat tidak sebanding untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan keseluruhan Wanita di Indonesia (Yusuf, 2016).

Menurut Goodnow negara memiliki 2 fungsi utama, yaitu policy makin dan policy eksekuting. Policy making adalah kewenagnagn negara untuk membuat peraturan di waktu tertentu sendangkan policy eksekuting adalah kewajiban negaar untuk menjalankan segala hal dalam policy making (Dadang, 2007). Bonus demografi akan diwariskan kepada generasi muda yakni mereka yang berumur produktif, karena disebutkan didalam laman www.kemenkeu.go.id bahwa pada masa tersebut, jumlah penduduk usia produktif diproyeksi berada pada grafik tertentu yakni sebesar 63,4 juta dari 179,1 juta jiwa yang merupakan usi prouktif. Melihat fenomena tersebut maka hasib masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan dengan pemuda hari ini. Mahasiswa merupakan salah satu elemen generasi muda yang stategis karena dianggap kaum terpelajar yang diberikan amanat untuk menjalankan tridarma perguruan tinggi (Iskandar, 2016). Jika dikaitkan dengan pelaksanaan budaya partisipan politik, maka mahasiswa menjadi subjek strategis untuk memasifkan internasilasasi budaya politik patisipan ini. Organisasi kemahasiswaan menjadi salah satu sarana mahasiswa mengembangkan banyak pengetahuan diluar bangku perkuliahan. Salah satu disiplin ilmu yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran politiknya adalah ilmu politik itu sendiri, serta turunan dari ilmu politik yang tidak kalau peting dan dekat dengan mahasiswa adalah pengetahuan mengenai sosiologi politik (Saleh & Munif, 2015).

Menurut Mauce Duverger, sosiologi poltik adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan tentang kekuasaan kepada manusia, baik secara berkelompo ataupun individu. Dalam menduduki jabatan strategis organisasi perlu rasanya untuk menguasai atau minimal mengetahui strategi untuk mendapatkan kekuasaan atau jabatan strategis yang diinginkan (Anggraeni et al., 2021). Poltik tidak selamanya dikaitan dengan pemerintahan tetapi politik adalah stategi yag dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Ilmu sosiologi sendiri membantu mengetahui sampai dimana susunan dan stratifikasi sosial memngaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, dcorak dansifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengadilan sosial dan perubahan sosial (Leni, 2012). Secara historis terdapat ketidakpuasan yang terjadi pada tahun 1960 terhadap dua dimensi isu politik dan kultural. Pandangan politik diangap mengabaikan nilai makna dan kebudayaan begitu pula pandangan kultural yang tidak bisa sekaligus memasifkan isu politik didalamnya. Sehingga perlu adanya konsep yang mengakomodir permasalahan tersebut. Menurut Brown (2000) secara definitf

budaya poltik sendiri memiliki dua kelompok definisi, yang pertama kelompok yang membatasi cakupan budaya politik pada orientasi subjektif bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial atau individu hingga politik (Komariah & Kartini, 2019).

Sehingga berdampak pada pemahaman budaya politik sebagai bentuk ekspresi dan symbol nilai yang menjadi ciri identik atau kekhasan. Dapat diartikan bahwa budaya politik sebagai merupakan persepsi subjektif tentang sejarah dan politik, atau secara filosofis sebagai keyakian nilai-nilai mendasar, lokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan politik yang merupakan produk dari pengalaman sejarah khusus dari bangsa atau kelompok. Kedua, kelompok yang memperluas konsep itu sehingga meliputi pola-pola perilaku politik. Dalam hal ini, dapat dianalogikan bahwa budaya politik sebagai matriks sikap dan perilaku di mana sistem politik berada. Jika dilihat dari konteks bangsa Indonesia hari ini, maka budayapoltik dapat dimaknai menjadi pola kehidupan masyarakat yang mengaplikasikan politik dengan benar di kehidupan sehari-harinya. Poltik dilakukan untuk melanggegkan pemerintahan di suatu negara. Maksudnya adalah demi estafeta kepemimpinan dan pembaharuan negara kedepannya, maka harus adanya pemiihan umum yang sangat membutuhkan partisipasi dari masyarkat (Paramitha et al., 2022). Negara dalam menjalankan misinya sebagai policy eksekuting berperan menjalankan amanat undang-undang untuk melaksanakan pemilihan umum untuk keberlangsungan proses demokrasi. Budaya politik yang akan dibentuk dari kepentingan pelanggengan proses demokrasi adalah budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah sebuah prinsip warga negara sebagai prioritas menjalankan Amanah demokrasi yakni sebagai subjek dan objek kesadaran politik. Ciri-ciri budaya poltik partisipan adalah sebagai berikut (Suryana, 2020): (1) Partisipasi tinggi dari masyarakat sebagai warga negara baik pro atau kontra terhadap suatau objek politik. (2) Menjadi pelopor akan kesadaran akan peran sebagai aktivis karena sebagai warga negara aktif. (3) Penuh rasa awas diri terkai berbagai objek dan isu politik yang berkembang, tidak langsung menerima, tunduk dan patuh pada suatu objek politik. (4) Dalam kontestasi pemilihan umum, warga negara dapat dianalogikan sebagai pembeli. Hal tersebut menjadikan setiap warganegara harus cermat dalam memilih, menolak dengan alasan yang kuat serta mendukungpun dengan penuh kesadaran.

Budaya politik partisipan bagi mahasiswa sebaagi agent of change juga menjadi hal yang harus terus digaungkan, mengingat beban bonus demografi yang akan diwariskan kepada mahasiswa hari ini di masa depan, mengaharuskan mahasiswa hari ini memiliki sikap politik dalam hal ini kesadaran menjalankan budaya poltik partisipan. Dalam sistem politik ada yang disebut dengan input yang terdiri dari tuntutan dan dukungan. Untuk memberikan tuntutan dan dukungan perlu adanya pengetahuan politik yang cukup serta kesadaran akan pentingnya menjadi control pemerintah (Moss et al., 2019). Memberikan dukunga dan tuntuntan dalam sistem politik dapat terjadi jika dilakukan sosialisai atau Pendidikan politik untuk mahasiswa. Organisai kemahasiswaan menjadi salah satu wadah untuk mendapatkan Pendidikan politik, karena dalam proses rekrutmen anggota dan pergantia periodesasi kepemimpinan di organasisasi akan diperlukan strategi atau politik taktis. Pendidikan politik yang diberikan dalam organisasi kemahasiswa diharapkan dapat menumbukan budaya politik parsipan bagi diri mahasiswa (Barnett, 2018). Dalam pelaksanaannya, berpartisipasi dalam ranah poltik tidak semua dapat merasakan keberadaannya, masih terdapat bias gender yang terjadi saat mengikuti organisasi kemahasiswan, karena konstruksi sosial yang mengakar menganai gender. Wanita dalam hal ini menjadi berperan hanya menjadi subordinat dibeberapa bidang atau di tempat yang disebut cocok dengan Wanita, contohnya sekretaris dan bendahara. Tidak ada kesempatan bagi Wanita untuk mencoba jabatan lain, Wanita yang memiliki keberanian untuk maju menjadi ketua dianggap menyalahi kodratnya, Wanita diharupkan mengalah jika dihadapkan dengan saingan laki-laki. Perasaan Wanita yang katanya halus dan tidak mendahulukan logika membuat Wanita tidak dapat bergerak bebas memilih passion yang dia miliki. Bagi Robert Stroller(1996) gender merupakan perbandingan kedudukan, peran serta watak yang dilekatkan pada pria ataupun wanita lewat konstruksisi secara sosial ataupun kultural. Dalam Women Studies Enslikopedia dipaparkan kalau gender merupakan sesuatu konsep kultur,

berupaya membuat perbandingan(distinction) dalam perihal kedudukan, tingkah laku, mentalitas serta ciri emosional antara pria serta wanita yang tumbuh dalam warga (Gosal, 2014).

Menilik definisi dari gender yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa gender tidak sama dengan seks yang secara fisik dan kondrati dimiliki oleh manusia serta tidak bida berubah. Sedangkan ranah kepemimpinan adalah ranah gender yang berhak dirasakan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam membangau kesadaran politik partisipan, perlu dimulai dari kesadaran dan sensitivitas gender pada siswa, sehingga dalam berpartisipasi dalam poltik atau menyediakan edukasi tentang Pendidikan poltik gender tidak menjadi bias lagi. Dalam menciptakan organisasi kemahasiswaan yang ramah gender bukannlah hal yang mudah, karena secara teori laki-laki di zaman modern seperti saat ini mayoritas memiliki keterbukaan berfikir, tertapi semua itu akan kalah dengan egosentris maskulinitas yang ada (Kurzman et al., 2019). Dapat disimpulkan bahwa sensitivitas gender menjadi hal mendasar dalam memiliki kesadran budaya politik partisipan. Penelitian ini berfokus pada pengkajian pengaruh organisasi kemahasiswaan dalam membentuk kesadaran budaya politik partisipan yang ramah gender. Tujuan penelitian ini untuk mengatahui peran organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan kesadaran pertisipasi politik, untuk mengetahui fungsi organisasi kemahasiswaan sebagai aktualisasi diri, untuk mengetahui efektifitas organisasi kemahasiswaan dalam membentuk budaya politik bekeadilan gender (Malihah et al., 2020).

Metode

Penelitian ini mengadopsi metode survei yang secara definitif dipahami sebagai penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan sebagai alat pengumpulan data pokok, sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Singaribun (1982). Desain penelitian didasarkan pada studi cross sectional, yang mengambil sampel waktu, perilaku, dan kejadian pada satu saat tertentu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhadjid (2011). Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan angket, yang dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan terkait peran organisasi kemaahsiswaan dalam membentuk budaya politik partisipan bagi mahasiswa. Setiap jawaban diberi skor berdasarkan skala sikap Likert untuk memudahkan analisis data. Prosedur penelitian dimulai dengan pembuatan instrumen pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Kemudian, setelah responden membaca dan merespons kuesioner, data disortir dan disiapkan untuk analisis statistik. Partisipan dalam riset ini adalah 32 mahasiswa Universitas Pembelajaran Indonesia, yang dipilih berdasarkan rasional tata cara riset yang digunakan dan tujuan penelitian ini. Partisipan diharapkan dapat membiasakan diri dengan prosedur penelitian, termasuk mengisi kuesioner atau angket dengan berbagai opsi jawaban.

Hasil dan pembahasan

Dalam teori organisasi modern yang dipolerkan oleh Herbert Simon, Daniel Katz dan Robert Kahn. Robbins (1994) menyebutan bahwa dalam organisasi perlu diadakan kerjasama yang massif diantara manajer dan anggota. Pandangan tentang struktur yang efekti bukanlah berasal dari manajer, tetapi hasil dari suatu pertarungan poltis diantara koalisi-koalisi di dalam organisai untuk memperoleh kontrol. Dalam hal ini proses politik menjadi hal yang lumrah dn niscaya terjadi dalam suatu organisasi.

Tabel 1. Skala Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Partisipan Politik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	3	8.8	8.8	8.8
	R	5	14.7	14.7	23.5
	S	10	29.4	29.4	52.9
	SS	16	47.1	47.1	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Pernyataan: “Organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti menambah wawasan saya mengenai politik”

Grafik 1. Skala Peran Organisasi Kemahasiswaan Dalam Meningkatkan Kesadaran Partisipan Politik

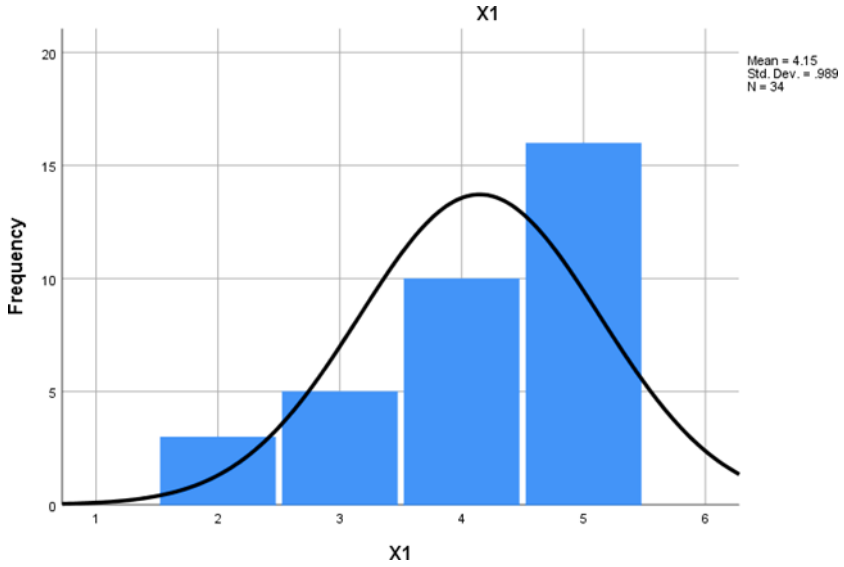

Dalam grafik di atas sumbu ‘X’ adalah point penilaian, sedangkan sumbu ‘Y’ adalah frekuensi atau banyak orang yang memilih, dengan rincian sebagai berikut 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. Hasil dari survei dalam penelitian ini adalah dari 34 responden, tidak terdapat responden yang sangat tidak setuju, 3 orang yang tidak setuju yakni sekitar 8,8% , 5 orang yang ragu-ragu yakni sekitar 14,7%, 10 orang yang setuju dengan presenan 29,4%, dan 16 orang yang sangat setuju dengan persentase 47,1%. Dari 34 responden menghasilkan nilai rata-rata 4,24, artinya hampir seluruh responden sepakat akan peran organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan kesadaran partisipasi politik.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemaparan teori diatas sesuai, karena saat dilakukan penelitian terhadap 34 responden dengan ditanyakan mengenai pernan organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan wawasan politik mahasiswa. Hal ini menunjukan bahwa responden telah menyetujui konsep politik massif dibelajarkan di organisasi kemahasiswaan baik secara teoritis ataupun praktis. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Robbins (1994) tentang teori organisasi modern, mengemukakan bahwa organisasi yang ideal bukanlah organisasi yang secara komando dikuasasi oleh manajer atau ketua, tetapi aka nada didalamnya lobby, koalisis dan komunikasi politik dalam mempertahankan kekuasaan dan program dalam sebuah organisasi. Samuel P. Hunginton dan Joan Nelson juga mendefinisikan partipasi poltik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilaan keputusan pemerintah. Huntinton juga menyebutkan bahwa politik dalam konteks pemerintahan, idealnya memiliki peran utama untuk mengedepankan kepentingan kolektif atau hajat hidup orang banyak dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, mencari koneksi untuk para pejabat pemerintah dan biasanya bermanfaat hanya bagi satu orang atau segelintir orang serta terlibat dalam tindak kekerasan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan menimbulkan kerugian fisik manusia maupun benda. Dalam kaitan dengan organisasi kemahasiswaan, konsep dan impementasi proses politik telah massif diinternalisasikan, maka dar itu tidak heran jika anggota organisasi memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi disbanding mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Dalam organisasi pun aka nada program yang dijalakan mengenai advokasi mahasiswa dan pengkajian isu terkini. Kajian tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada kesadaran mahasiswa terhadap isu dan partisipasi politik.

Abraham Maslow mengemukakan teori mengenai kebutuhan dasar manusi basic needs yang mana puncaknya adalah aktualisasi diri, maslow merepresntasikan aktulisasi diri merupakan tingkat tertinggi dari perkembangan masnuai. Beberapa kriteria dari pribadi yang mencapai aktualisasi diri adalah Bergerak maju melewati hierarki kebutuhan, memegang erat-erat B-values tau metamotivation dan bebas dari metapatologi serta memenuhi kebutuhan untuk betumbuh kembang menjadi apa yang dicita-citakan. Jika dikatkan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, maka karakteristik aktualisasi diri bisa lebih diperluas menjadi beberapa spesifikasi karakteristik, salah satunya Gemeinschaftsgefühl : yaitu memiliki kepedulian sosial, perasaan komunitas, atau rasa persatuan dengan seluruh manusia. Aktualisasi bukan hanya sekedar menempatkan diri dalam pencapaian tertinggi yang diharapkan tetapi memberikan kepedulian kepada isu yang sedang berkembang salah satunya isu politik. Organisasi kemahasiswaan memiliki esensi untuk mengembangkan minat dan bakat serta mengadvokasi mahasiswa atau angota organisasi tersebut,

Tabel 2. Skala Peran dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Aktualisasi Diri

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	2.9	2.9	
	R	2	5.9	5.9	
	S	11	32.4	32.4	
	SS	20	58.8	58.8	0
	Total	34	100.0	100.0	

Pernyataan : “Organisasi kemahasiswaan dapat mengembangkan diri saya.

Grafik 2. Skala Peran dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan sebagai Wadah Aktualisasi Diri

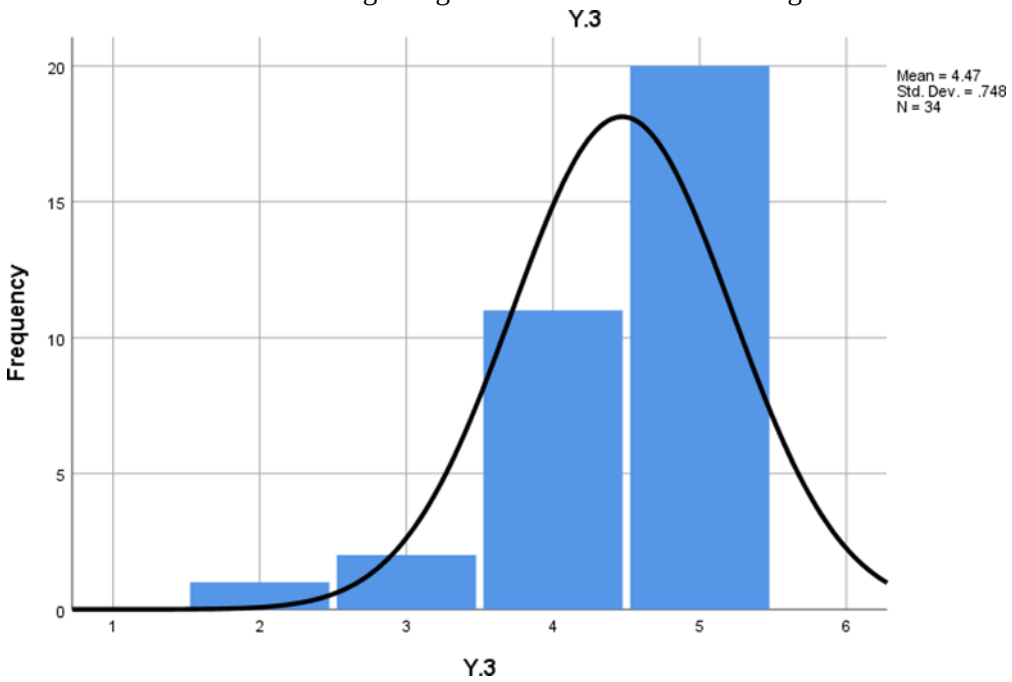

Pernyataan : “Organisasi kemahasiswaan dapat mengembangkan diri saya”.

Dalam grafik di atas sumbu ‘X’ adalah point penilaian, sedangkan sumbu ‘Y’ adalah frekuensi atau banyak orang yang memilih, dengan rincian sebagai berikut 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. Hasil dari survei dalam penelitian ini adalah dari 34 responden, tidak terdapat responden yang sangat tidak setuju, 1 orang yang tidak setuju yakni sekitar

2,9% , 2 orang yang ragu-ragu yakni sekitar 5,9%, 11 orang yang setuju dengan presenan 32,4%, dan 20 orang yang sangat setuju dengan persentase 58,8%. Dari 34 responden menghasilkan nilai rata-rata 4,47, artinya hampir seluruh responden sepakat akan peran dan fungsi organisasi kemahasiswaan sebagai wadah aktualisasi diri.

Penelitian ini membuktikan bahwa pemaparan teori diatas sesuai, karena saat dilakukan penelitian terhadap 34 responden dengan ditanyakan mengenai peran organisasi kemahasiswaan sebagai wadah aktualisasi mahasiswa. Hal ini menunjukan bahwa responden telah merasakan manfaat dari organisasi kemahasiswaan sebagai saranan pengembangan diri. Menurut Sutanto (1985) organisais didefinisikan sebagai sistem yang mempunyai pengaruh kepada satu orang atau satu kelompok secara spontan, efektif dan alamiah. Konsep aktualisasi diri yang merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh manusia bisa diupayakan salah satunya dengan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan. Mahasiswa sebagai elemen strategis yang akan diamanahi bonus demografi harus mampu mengaktualisasikan diri setinggi-tingginya, pengalaman yang didapatkan oleh mahasiswa di masa akan sangat bermanfaat saat sudah diberi Amanah tampuk kepemimpinan. Tela dijelaskan sebalumnya bahwa organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu saranan Pendidikan politik di lingkungan universitas juga dapat dikategorikan sebagai bagaian dari aktulisasi diri. Memiliki pengetahuan politik baik teoritis ataupun praktis menjadi suatu hal yang bermanfaat jika diimplementasikan di dalam ataupun luar organisasi. Menjadi hal lumrah dan niscaya adanya jika mahasiswa berhasilkan mengembangakan dirinya melewati organisasi, karena organisasi menawarkan pengalaman dan pembelajaran diluar bangku perkuliahan atau menawarkan soft skill, seperti kepemimpinan, administrasi, advokasi dan lain sebagainya.

Menurut Menurut Almon dan Powel sistem politik mencakup : 1) Orientasi kognitif, yaitu pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. 2) Orientasi afektif, yaitu aspek perasaan dan emosional seseorang individu terhadap sistem politik. 3) Orientasi evaluatif, yaitu penilaian seseorang terhadap sistem politik, menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik terhadap kinerja sistem politik. Budaya poltik sendiri mencapul beberapa ruang lingkup yakni Gejolak masyarakat masalah legitimasi, penaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan partai politik dan perilaku aparan negaraBudaya politik partisipan merupakan jenis budaya yang sempurna. Orang serta masyarakatnya sudah memiliki atensi, pemahaman serta atensi yang besar terhadap politik pemerintah. Orang serta masyarakatnya sanggup memainkan kedudukan politik baik dalam proses input (berbentuk pemberian sokongan ataupun tuntutan terhadap sistem politik) ataupun dalam proses output (melakukan, memperhitungkan serta mengkritik terhadap kebijakan serta keputusan politik pemerintah). Gender bagi Jary serta Jary dalam ukunya yang berjudul dictonary of sociology mendefinisikan gender dalam sebutan“ masculine” serta“ feminime”, yang berarti gender ditatap bukan dari raga melainkan dari konstruksisi sosial kultural di warga.

Keadilan gender berarti upaya kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Jika konteksnya adalah partisipasi poltik, maka perlu adanya keadilan gender dalam pelaksanaan partisipasi politik. Budaya politik partisipan tidak mengeksplisitkan kesenjanga ataupun bias gender, semua masyarakat wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan proses demokrasi. Keadilan gender dalam partisipasi politik berarti menjamin bahwa baik pria maupun wanita memiliki akses yang sama dan kesempatan yang setara untuk terlibat dalam proses politik. Ini mencakup hak untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa keadilan gender dalam partisipasi politik juga memperhitungkan perbedaan sosial lainnya seperti status ekonomi, etnisitas, dan latar belakang budaya. Dengan memastikan keadilan gender dalam partisipasi politik, masyarakat dapat mencapai representasi yang lebih inklusif dan keputusan yang lebih beragam, mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua anggota masyarakat.

Tabel 3. Skala Efektifitas Organisasi Kemahasiswaan dalam Membentuk Budaya Politik Bekeadilan Gender

	Frequency		Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	R	1	2.9	2.9	2.9
	S	11	32.4	32.4	35.3
	SS	22	64.7	64.7	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

Pernyataan : “Dengan mengikuti Organisais Kemahasiswaan, Saya Merasa Memiliki Kekuatan Untuk Menegakan Keadilan Gender”.

Grafik 3. Skala Efektifitas Organisasi Kemahasiswaan dalam Membentuk Budaya Politik Bekeadilan Gender

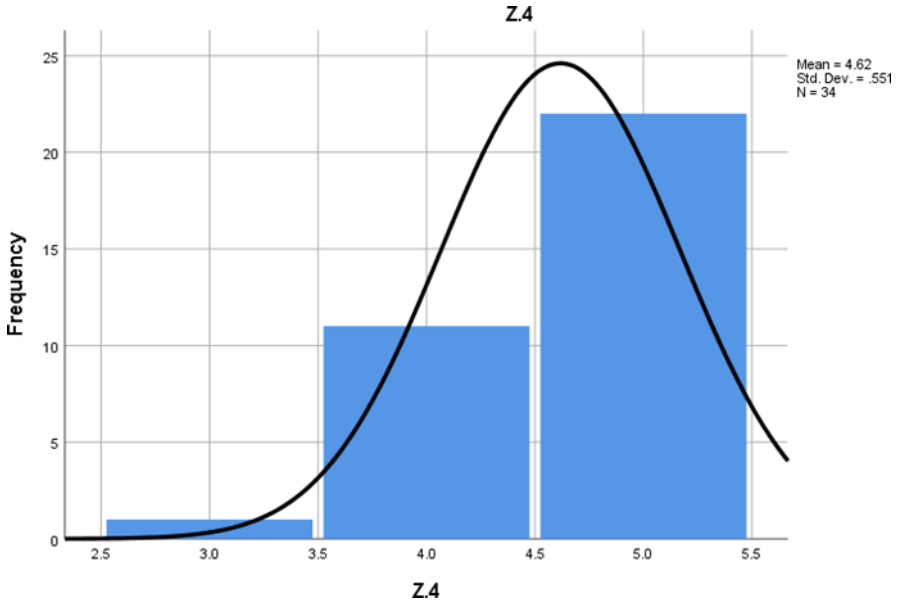

Pernyataan : “Dengan mengikuti Organisais Kemahasiswaan, Saya Merasa Memiliki Kekuatan Untuk Menegakan Keadilan Gender”.

Dalam grafik diatas sumbu ‘X’ adalah point penilaian, sedangkan sumbu ‘Y’ adalah frekuensi atau banyak orang yang memilih, dengan rincian sebagai berikut 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = Ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. Hasil dari survei dalam penelitian ini adalah dari 34 responden, tidak terdapat responden yang memilih opsi sangat tidak setuju dan tidak setuju, 1 orang yang ragu yakni sekitar 2,9% , 11 orang yang setuju dengan presenan 32,4%, dan 22 orang yang sangat setuju dengan persentase 64,7%. Dari 34 responden menghasilkan nilai rata-rata 4,62, artinya hampir seluruh responden sepakat akan organisasi kemahasiswaan efektif dalam membangun budaya politik partisipan ramah gender bagi mahasiswa.

Almond dan Powell menyampaikan definisi budaya politik sebagai suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola-pola kecenderungan khusus serta pola - pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok - kelompok dalam masyarakat. Budaya politik harus sudah dibiasakan dalam tananan formal maupun informal. Organisasi kemahasiswaan yang terbukti menjadi ajang Pendidikan politik tentu dapat meningkatkan kesadaran politik dalam diri mahasiswa. Banyak isu yang bisa ditumbuhkembangkan dan diinternalisasikan melalui organisasi kemahasiswaan, salah satunya isu gender. Seperti fenomena yang sebelumnya dikemukakan diatas bahwa keterwakilan Wanita di parlemen yang notabene representasi

masyarakat Indonesia. Urgensi penegakan keadilan gender dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya menjadi penggiat gender di ranah organisasi terdekat. Sebagai aktivis mahasiswa isu gender bukan hanya perhiasan yang baik untuk dipajang saja, tetapi harus dicari solusi konstruksitif dalam permasalahan tersebut. Organisasi kemahasiswaan yang sudah terbukti dapat menginternalisasikan nilai partisipasi politik di ranah mahasiswa belum cukup untuk dijadikan solusi organisasi yang ramah gender. Perlu ada kesadaran lebih lanjut yang untuk mewujudkan organisasi ramah gender sekaligus menjalankan fungsinya sebagai ajang belajar bagi seluruh anggotanya. Berdasarkan survei yang telah dilakukan bahwa mayoritas mahasiswa merasa lebih berdaya untuk menggaungkn naskah kesetaran saat sudah berada dalam organisasi, hal ini menajdi indikator menciptakan budaya politik yang ramah gender juga bukan hal sulit jika sudah ada kesadaran akan urgensitas gender dan partisipasi politik.

Simpulan

Budaya politik partisipan jadi perihal yang mahal bila tidak sempat dibelajarkan ataupun diinternalisasikan dalam Pembelajaran resmi ataupun informal. Organisasi kemahasiswaan teruji efisien dalam penerapan politik instan serta pembejaran politik teoritis. Budaya politik berkeadilan gender yang diartikan dalam riset ini merupakan upaya pembiasaan dalam partisipasi politik yang tidak mensubordinasi kedudukan siapapun, baik pria serta perempun. Pemicu terdapatnya bias serta ketidaksetaraan gender merupakan konstruksi sosial yang galat dalam memisahkan ranah gender baik dalam zona domestic serta public, sehingga berdampak pada pelabelan dan budaya yang salah hendak hakikat kodrat pria serta perempuan. Butuh terdapatnya upaya secara massif buat mengawal isu kesetaraan gender ini, salah satu upaya yang dinaikan dalam riset ini merupakan organisasi kemahasiswaan. Riset ini menciptakan fakta efektifitas organisasi kemahasiswaan dalam membentuk budaya politik partisipan serta fasilitas buat membelajarkan konsep gender secara lebih luas. Akhirnya internalisasi budaya politik partisipan yang berkeadilan gender bisa dicoba dengan bermacam berbagai metode, salah satunya lewat organisasi kemahasiswaan, riset ini meyakinkan organisasi kemahasiswa bisa terus jadi semangat anggotanya buat berpartisipasi dalam politik. Anjuran yang bisa diberikan buat tingkatkan budaya politik partisipan adalh dengan memasifkan sosialisasi politik dari lembaga terpaut, sehingga secara resmi pemerintah telah melaksanakan kewajibannya buat membagikan pengetahuan hendak urgensitas budaya politik partisipan. Perihal ini pula bisa jadi motivasi buat menulis harian dengan tema yang mengupas tuntas konsep serta implementasi solialiasi politik dalam konteks modern.

Referensi

Anggraeni, L., Darmawan, C., Tanshzil, S. W., & Jubaedah, E. (2021). Promoting Ksatria Bela Negara comic through the Webtoon for the prevention and control Covid-19. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *18*(1), 138–147. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.39377

Barnett, M. (2018). Gender equality, norms and practices: post-script to special issue on new actors, old donors and gender equality norms in international development cooperation. *Progress in Development Studies*, *18*(3), 208–213. https://doi.org/10.1177/1464993418766588

Gosal, R. (2014). Budaya Politik Di Indonesia (Suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi). In *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat.* http://repo.unsrat.ac.id/708/1/Gosal_2.pdf

Hadori, M. (2015). Aktualisasi-Diri (Self-Actualization); Sebuah Manifestasi Puncak Potensi Individu Berkepribadian Sehat. *Jurnal Lisan Al-Hal*, *9*(2), 261–287. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.92

Iskandar, I. (2016). Implementasi Teori Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow terhadap Peningkatan Kinerja Pustakawan. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, *4*(1), 23–34. https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a2

Komariah, K., & Kartini, D. S. (2019). Media Sosial dan Budaya Politik Generasi Milineal dalam

Pemilu. *Aristo*, *7*(2), 228. https://doi.org/10.24269/ars.v7i2.1608

Kurzman, C., Dong, W., Gorman, B., Hwang, K., Ryberg, R., & Zaidi, B. (2019). Women's Assessments of Gender Equality. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, *5*, 237802311987238. https://doi.org/10.1177/2378023119872387

Leni, N. (2012). Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut R. Zuhro, dkk. *TAPIs*, *8*(1), 69. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1542

Malihah, E., Nurbayani, S., & Anggraeni, L. (2020). Why is There Zero Women Candidate for Governor Election in West Java, Indonesia? *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, *12*(1), 1–11. https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i1.21373

Moss, A. J., Blodorn, A., Van Camp, A. R., & O'Brien, L. T. (2019). Gender equality, value violations, and prejudice toward Muslims. *Group Processes and Intergroup Relations*, *22*(2), 288–301. https://doi.org/10.1177/1368430217716751

Paramitha, S. T., Komarudin, Fitri, M., Anggraeni, L., & Ramadhan, M. G. (2022). Rethinking the Relationship between Technology and Health through Online Physical Education during the Pandemic. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, *10*(1), 132–144. https://doi.org/10.46328/ijemst.2165

Saleh, K., & Munif, A. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *Addin*, *9*(2), 309–332. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v9i2.617

Suryana, Y. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Terhadap Budaya Politik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *29*(1), 13–28. https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.13-28

Yoon, M. Y., & Moon, C. (2019). Gender equality in politics at home and promotion of gender equality in politics abroad: The role of bilateral official development assistance. *International Political Science Review*, *40*(2), 161–180. https://doi.org/10.1177/0192512118757127

Yusuf, M. (2016). Perkembangan Budaya Poltik Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu*, *24*(1), 28–34. https://doi.org/https://doi.org/10.32672/si.v11i1.218